

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Sesuai dengan pertanyaan penelitian, maka penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan yakni sebagai berikut.

1. Kualitas SAI berpengaruh positif terhadap indeks persepsi korupsi. Indeks persepsi korupsi memproksikan tingkat korupsi. Kualitas SAI dapat menjelaskan tingkat korupsi sebesar 26%. Pengaruh positif dilihat dari nilai koefisien  $b_1$  dalam model regresi. Hal ini menyebabkan  $H_0$  ditolak. Fenomena hasil survei *Transparency International* tahun 2018 yang menyatakan bahwa sebagian besar negara yang disurvei hanya sedikit bahkan tidak ada kemajuan dalam pemberantasan korupsi, tidak terlalu signifikan dapat dilihat dari kualitas SAI. Hal ini dikarenakan, selain nilai  $R^2$  yang hanya 26%, apabila melihat nilai rata-rata global indeks SAI telah termasuk pada kategori memadai (skor antara 60-100).
2. Tipe hukum negara dapat memoderasi pengaruh kualitas SAI terhadap tingkat korupsi dengan arah positif (koefisien  $b_3$ ). Model regresi dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 40,8%, tetapi dimasukkannya variabel tipe hukum negara sebagai variabel pemoderasi hanya dapat meningkatkan pengaruh sebesar 0,9%. Kemudian, dengan melihat grafik 7 di atas dapat dilihat bahwa tipe hukum *common law* lebih baik daripada *civil law*.

#### 5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini, setidaknya memiliki dua keterbatasan sebagai berikut.

1. Penelitian ini baru meneliti satu dari banyak lembaga anti-korupsi. Kualitas SAI di dunia memiliki rata-rata sebesar 68,83 di tahun 2012, 64,75 tahun 2015 dan 63,39 tahun 2017. Skor tersebut berada pada level *adequate* menurut kriteria dari IBP. Berdasarkan hasil penelitian ini, tingkat korupsi hanya bisa dijelaskan oleh kualitas SAI sebesar 26%. Artinya, masih ada 74% hal lain untuk melihat tingkat korupsi di negara-negara di dunia.

2. Penelitian ini tidak melakukan pengklasifikasian lebih lanjut. Variabel pemoderasi tipe hukum negara hanya mampu meningkatkan pengaruh sebesar 0.9%. Hal ini bisa saja dikarenakan, penelitian ini baru mencakup dua tipe hukum (*civil law* dan *common law*) dari lima tipe hukum negara lainnya. *Mixed law* yang merupakan tipe hukum yang dianut mayoritas negara belum dicantumkan dikarenakan tipe hukum nya yang sangat bervariasi. Pengklasifikasian juga tidak memperhatikan keadaan lembaga anti-korupsi yang mana lembaga ini khusus menangani permasalahan korupsi di negara-negara tersebut.

### 5.3. Saran

Saran yang penulis sampaikan sesuai dengan temuan dalam penelitian ini, setidaknya ditujukan untuk dua pihak sebagai berikut.

#### 1. Bagi Pemerintah

Melihat rata-rata kualitas SAI global yang sudah dalam kategori *adequate* di ketiga tahun (68,83 di tahun 2012; 64,75 tahun 2015; dan 63,39 tahun 2017), sementara nilai *R Square* kualitas SAI hanya sebesar 26%, artinya pemerintah masih perlu meningkatkan kualitas SAI nya. Meskipun sudah dalam kategori *adequate* akan tetapi skor nya masih belum terlalu tinggi (lebih dekat pada kategori terbatas (*limited*) yang skor nya antara 40-60). Selain itu di ketiga tahun survei rata-rata global SAI cenderung mengalami penurunan.

Kemudian melihat sisi penegakan hukum yang diukur dengan menggunakan tipe hukum negara. Model tanpa interaksi, nilai *R Square* nya sebesar 39.9%, kemudian setelah adanya interaksi hanya meningkat sebesar 0.9% menjadi 40.8%. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum bukan saja berperan sebagai institusi pendukung dalam pemberantasan korupsi, tetapi sejajar dengan institusi lain (dalam hal ini SAI). Hal ini dapat dilihat dari nilai *R Square* nya yang lebih tinggi ketika ia menjadi variabel independen dibandingkan sebagai variabel moderator. Artinya, pemerintah juga harus memperhatikan cara penegakan hukum di negaranya. Terlebih lagi, teruji secara empiris bahwa negara bertipe *common law* lebih baik daripada yang bertipe *civil law*.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih perlu banyak pengembangan, terutama terkait dengan pengklasifikasian yang lebih mendalam pada tipe hukum negara sehingga sampel yang digunakan bisa lebih besar dan representatif. Kemudian terkait dengan lembaga anti-korupsi yang khusus dalam pemberantasan korupsi, dapat menjadi pertimbangan peneliti selanjutnya.